

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2023.

Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, 2020.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020.

Mujiburohman, Dian Aries, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2022.

Pattynama, Francis Maryanne, *Dinamika Hukum dan Perlindungan Importir*, Literasi Langsung Terbit, 2024.

Raden, Sahran, *Aspek Hukum Pelaksanaan Impor Bibit Tanaman Belum Terdaftar dalam Harmonized System Code*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025.

_____, *Hukum Administrasi Negara*, CV Bravo Press Indonesia, Pekanbaru, 2025.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Suyanto, *Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022.

Teguh, Harrys Pratama dan Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*, 2022.

Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2024.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Beberapa Kesalahan Konseptual pada UU Cipta Kerja Menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Fanggi, Prandy A.L., “Analisis Konseptual Stufenbau Theory terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 2, 2025.

Fuadi, Abdul Basid, “Pertanggungjawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Gandara, Moh, “Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat,” *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020.

Hayati, Muslimah, “Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah,” *Wasaka Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021.

Hayati, S. dan L. K. Nst, “Sistem Penerimaan Kas atas Bea Masuk Barang Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,” *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 2017.

Hente, Julman, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara,” *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Ismail, Tjip dan Intan Permata Sari Palayukan, “Pelaksanaan National Single Window dengan Pemberlakuan Harmonized System Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 11, No. 2, 2023.

Kristinah, Nelly, et.al., “Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam, Indonesia,” *Ganesha Civic Education Journal*, 2021.

Mau, Hedwig Adianto, Taufiq Hidayat Ramlani dan Lina Sinaulan, “Penaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Koreksi Nilai Pabean Impor oleh Pejabat Bea dan Cukai,” *Jurnal Pascasarjana Universitas Jayabaya*, Vol. 23, No. 1, 2023.

Maya, Kresnha Adhy W. Alya, “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Muhaimin, “Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan Rule of Law,” *Jurnal De Jure*, Vol. 17, No. 1, 2017.

Muklis, “Kewenangan Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 7, No. 1, 2026.

Naldi, Nur Hidayat Apri dan Kastulani, “Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022,” *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Pahlevi, Yonathan Agung, Akhmad Firdiansyah dan Wachid Hasyim, “Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,” *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Pattynama, Francis Maryanne, “Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Memenuhi Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Importer,” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 14, No. 27, 2018.

Penyelenggaraan, Sistem dan Administrasi Negara, “Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara,” *Jurnal Administrasi Negara*, No. 5, 2015.

Putra, Arsenius Gerhant Rosa dan Rr. Adeline Melani, “Tinjauan Hukum terhadap Pengenaan Pajak atas Barang Bawaan Penumpang Ditinjau dari Aturan Kepabeanan dan Perpajakan Indonesia,” *Jurnal Gloria Justitia*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Rini, Nicken Sarwo, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal De Jure*, Vol. 18, No. 740, 2018.

Sahetapy, Marcelina Angelita, et.al., “Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara,” *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Susanto, Sri Nur Hari, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 3, 2020.

Ulum, Bahrul, “Pengujian Kewenangan Administratif dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Mekanisme Praperadilan,” 2022.

Umacina, Nurhidayat, “Penerapan Asas Legalitas dalam Sengketa Pajak Impor: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 5304/B/PK/Pjk/2024,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 1, 2026.

Winarno, Jatmiko, “Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Setelah Pemberitahuan Pabean Diajukan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*, Vol. 2, 2013.

Zaini, Ahmad, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM,” *Jurnal Fakultas Syariah UIN Banten*, Vol. 11, No. 1, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001094.47/2022/PP/MXVIIA Tahun 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5304/B/PK/Pjk/2024.

E. Konvensi dan Dokumen Internasional

World Customs Organization, *International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System*, Brussels, 1983.